

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan sebagaimana terurai dalam Bab-bab terdahulu, maka sebagai penutup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap Kreditor Kedua belum terdapat kepastian hukum, dalam Pasal 11 UUJF menyatakan bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal ini memberikan multitafsir, meskipun sudah ada PP yang mengatur tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara online, akan tetapi masih dimungkinkan adanya jaminan fidusia ulang. Notaris tidak diwajibkan untuk mengecek jaminan fisik apakah benar sesuai dengan surat pernyataan pemberi jaminan fidusia, kepastian hukum bagi kreditor kedua, karena hak yang diutamakan adalah kreditor pertama sebagai kreditor preferen.
2. Dengan adanya kekaburan hukum atas Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Jaminan Fidusia disebut juga UUJF, bentuk perlindungan hukum diwujudkan dengan cara merekonstruksi Pasal 11 ayat (1) UUJF yaitu dengan menambahkan pendaftaran dengan syarat sepanjang memenuhi syarat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima jaminan fidusia.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebagaimana tersaji di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia hendaknya memperbaiki sistem elektronik dalam hal pendaftaran jaminan fidusia untuk menghindari jaminan fidusia ulang dan mengurangi risiko fidusia ulang dapat diminimalisir dan penyempurnaan fidusia online dan para pihak lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian jaminan fidusia, bagi Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Jaminan Fidusia lebih hati – hati dengan adanya Fidusia Online.
2. Bagi Pemerintah untuk mengkontruksi Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, agar tidak menimbulkan kekaburan hukum yang menyebutkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia dan perlunya sosialisasi secara terus menerus terkait peraturan pendaftaran Jaminan Fidusia dari Kemenkumham untuk mengetahui informasi dan perkembangan hukum yang terbaru.